

Existentialism: Analisis Filosofis dalam Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1945

Rony Wirachman¹, Mariana Magdalena Sihole², Mariyani³ & Willda Mulyanti⁴
Universitas Pendidikan Indonesia

ronywira@upi.edu, marianamagadalenas@upi.edu, mariyani.93@upi.edu, wildamulyanti@unper.ac.id

Abtrack

This study aims to examine the Proclamation of Indonesian Independence on August 17, 1945, as a collective existential act of the Indonesian nation through the perspective of existentialist philosophy. This study is directed at formulating a theoretical framework of existentialism, interpreting the Proclamation as a historical decision reflecting freedom, responsibility, and moral courage, and providing conceptual contributions to the development of studies in the philosophy of history and Civic Education. The research method used is a literature study with a qualitative-philosophical approach, through analysis and synthesis of primary sources in the form of works of existentialist figures (Jean-Paul Sartre, Søren Kierkegaard, Karl Jaspers, Albert Camus, and Friedrich Nietzsche) as well as historical documents of the Proclamation of Indonesian Independence, and secondary sources in the form of books and relevant scientific journal articles. The results of the study indicate that the Proclamation of Indonesian Independence cannot be understood solely as a political and juridical event, but as an existential act born from a historical boundary situation. The nation's founders consciously chose independence amidst uncertainty and risk, so that the Proclamation became an affirmation of national existence and moral responsibility towards the nation's future. These findings confirm that Indonesian independence is an ongoing existential project and has important relevance for the learning of history and the formation of critical, reflective, and responsible citizens.

Keyword : *Existentialism; Philosophy; Proclamation of Indonesian Independence 1945*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai tindakan eksistensial kolektif bangsa Indonesia melalui perspektif filsafat eksistensialisme. Kajian ini diarahkan untuk merumuskan kerangka teoretis eksistensialisme, menginterpretasikan Proklamasi sebagai keputusan historis yang mencerminkan kebebasan, tanggung jawab, dan keberanian moral, serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian filsafat sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-filosofis, melalui analisis dan sintesis sumber primer berupa karya tokoh eksistensialisme (Jean-Paul Sartre, Søren Kierkegaard, Karl Jaspers, Albert Camus, dan Friedrich Nietzsche) serta dokumen historis Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan sumber sekunder berupa buku serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa politik dan yuridis, melainkan sebagai tindakan eksistensial yang lahir dari situasi batas sejarah. Para pendiri bangsa secara sadar memilih kemerdekaan di tengah ketidakpastian dan risiko, sehingga Proklamasi menjadi penegasan eksistensi nasional dan tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa. Temuan ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan proyek eksistensial yang berkelanjutan dan memiliki relevansi penting bagi pembelajaran sejarah dan pembentukan warga negara yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab.

Keyword: Eksistensialisme; Filosofis; Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945

Pendahuluan

Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 bukan hanya penting sebagai pengetahuan masa lalu, tetapi juga sebagai modal strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara, memperkuat identitas nasional, dan menumbuhkan nasionalisme yang konstruktif. Kesadaran historis ini menjadi landasan bagi partisipasi aktif warga negara dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan sesuai dengan semangat SDGs, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan dimasa depan.

Dalam konteks global, pemahaman sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga relevan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Nilai-nilai yang terkandung dalam proklamasi, seperti kemerdekaan, keadilan, persamaan, dan kesejahteraan. Sejalan dengan tujuan SDGs, khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) (sdgs.un.org).

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 umumnya dipahami sebagai peristiwa politik dan historis yang menandai lahirnya negara Indonesia secara yuridis dan formal. Dalam kajian sejarah konvensional, Proklamasi sering dianalisis melalui pendekatan kronologis, politik kekuasaan, atau peran tokoh-tokoh nasional. Namun, pendekatan tersebut cenderung menempatkan Proklamasi sebagai fakta objektif semata, sehingga kurang menggali dimensi filosofis yang melatarbelakangi tindakan manusia Indonesia dalam menentukan keberadaannya sebagai bangsa yang merdeka.

Pada 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi titik bersejarah yang menandai pembentukan kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa; studi tentang momen pembentukan negara semacam ini umumnya ditempatkan dalam kajian nasionalisme dan teori bangsa yang luas. Delanty dan Kumar

menegaskan bahwa tindakan-tindakan pembentukan bangsa perlu dipahami dalam konteks modernitas, identitas kolektif, dan proses politik yang lebih besar (Delanty & Kumar, 2002).

Eksistensialisme memandang manusia sebagai makhluk bebas yang bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Kebebasan bukan sekadar hak, tetapi juga beban moral yang menuntut keberanian dan komitmen terhadap konsekuensi pilihan tersebut (Sartre, 2002; Tillich, 1952).

Eksistensialisme sebagai aliran filsafat menekankan bahwa manusia adalah subjek yang bebas, sadar, dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Pemikiran tokoh seperti Jean-Paul Sartre dan Søren Kierkegaard menegaskan bahwa eksistensi manusia mendahului esensinya, sehingga makna hidup dan tindakan manusia ditentukan melalui keputusan konkret dalam situasi historis tertentu (Sartre, 2002; Kierkegaard, 1989). Dalam konteks sejarah Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan dapat dipahami sebagai keputusan eksistensial bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kajian tentang sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia umumnya difokuskan pada aspek kronologis, tokoh, dan fakta historis, sementara dimensi filosofis khususnya yang menekankan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab manusia – masih jarang dieksplorasi secara mendalam dalam pembelajaran PKn (Susanto, 2014; Kartodirdjo, 1993). Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan pendekatan filosofis dalam memahami makna Proklamasi sebagai peristiwa eksistensial bangsa.

Selain itu, kajian Proklamasi dalam konteks pendidikan dan pembentukan kesadaran kewarganegaraan masih menekankan aspek hafalan peristiwa dan tokoh, belum mengintegrasikan analisis filosofis yang dapat menumbuhkan pemahaman kritis tentang makna kebebasan, tanggung jawab, dan keotentikan sebagai nilai kewarganegaraan (Biesta, 2015).

Meskipun literatur tentang nasionalisme dan historiografi Proklamasi luas dan terdokumentasi (Delanty, 2002), kajian yang secara eksplisit mengaplikasikan kerangka eksistensialisme filosofis kepada narasi Proklamasi masih terbatas terdapat celah penelitian yang memerlukan penelaahan konseptual dan hermeneutik yang sistematis.

Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga manifestasi keberanian eksistensial para pendiri bangsa dalam mengambil risiko, memilih kemerdekaan, dan bertanggung jawab atas masa depan bangsa. Nilai-nilai kebebasan, kesadaran, dan tanggung jawab yang terkandung dalam peristiwa Proklamasi selaras dengan prinsip-prinsip eksistensialisme, namun belum banyak dianalisis sebagai landasan filosofis dalam pembelajaran PKn dan IPS (Latif, 2011; Ricklefs, 2008).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, praktik pembelajaran PKn di Indonesia masih cenderung bersifat normatif, hafalan, dan berorientasi pada transmisi nilai secara dogmatis, sehingga kurang memberi ruang bagi peserta didik untuk memaknai pengalaman sejarah dan kebangsaan secara personal dan reflektif (Winataputra, 2012; Wahab & Sapriya, 2011).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa filsafat eksistensialisme memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam membangun kesadaran individu sebagai subjek aktif dalam kehidupan sosial (Purnama et al., 2024). Namun, penerapan eksistensialisme dalam pendidikan masih dominan pada ranah teoritis dan pedagogi umum, dan belum banyak dikaitkan secara kontekstual dengan sejarah nasional. Hal ini menunjukkan bahwa IPS memiliki peluang strategis untuk menjadi ruang aktualisasi eksistensialisme melalui kajian

sejarah Proklamasi sebagai pengalaman sosial yang autentik.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) merumuskan kerangka teoretis eksistensial yang berubungan dengan (2) menginterpretasikan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1945 terkait sebagai tindakan eksistensial, dan (3) menawarkan kontribusi konseptual bagi kajian filsafat sejarah dan pendidikan kewarganegaraan. Harapannya, penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa Proklamasi tidak hanya fenomena politis, tetapi juga tindakan eksistensial penuh makna dan tanggung jawab moral.

Terdapat gap penelitian berupa kajian sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang masih dominan bersifat deskriptif-historis dan gap yang telah dijelaskan diatas. Oleh karena itu, maka diperlukan penelitian ini untuk mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis filosofis eksistensialisme terhadap sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sehingga mampu memperkaya pemahaman filsafat sejarah serta memberikan kontribusi konseptual bagi kajian pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran kebangsaan.

Metode Penelitian

Metode studi literatur adalah pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menghimpun, menelaah, mengkritisi, dan mensintesis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, baik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen historis, maupun arsip akademik. Literature review tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan bacaan, tetapi sebagai proses analitis untuk memahami perkembangan teori, konsep, dan temuan ilmiah yang relevan sehingga dapat membangun dasar konseptual penelitian secara kuat (Ridley, 2012).

Dalam penelitian kualitatif dan filosofis, studi literatur dipahami sebagai metode utama untuk menafsirkan makna, gagasan, dan kerangka pemikiran yang tertuang dalam teks. Creswell menegaskan bahwa *literature review* berperan penting

dalam menempatkan penelitian dalam konteks keilmuan yang lebih luas, sekaligus menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian terhadap diskursus akademik yang ada (Creswell & Poth, 2018). Melalui metode ini, peneliti dapat membangun pemahaman konseptual yang mendalam mengenai eksistensialisme serta bagaimana nilai-nilainya termanifestasi dalam peristiwa sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Sumber primer adalah bahan pustaka utama yang menjadi objek langsung analisis penelitian karena memuat gagasan orisinal atau kesaksian langsung atas peristiwa yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, sumber primer meliputi: Karya filsafat eksistensialisme Buku dan tulisan asli tokoh eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre, Søren Kierkegaard, Karl Jaspers, atau Albert Camus yang membahas konsep kebebasan, tanggung jawab, pilihan, dan keberadaan manusia. Dokumen historis Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Teks Proklamasi 17 Agustus 1945, Pidato dan tulisan Soekarno, Mohammad Hatta, serta tokoh pergerakan, Arsip sejarah dan dokumen resmi terkait proses Proklamasi Sumber-sumber ini digunakan untuk menggali makna eksistensial dari tindakan, keputusan, dan sikap para tokoh bangsa dalam momen Proklamasi.

Sumber sekunder adalah bahan pustaka pendukung yang memberikan interpretasi, analisis, atau penjelasan atas sumber primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder meliputi: Buku dan jurnal ilmiah tentang: Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Filsafat eksistensialisme, Filsafat sejarah dan filsafat politik. Artikel jurnal terindeks yang: Mengkaji eksistensialisme dalam konteks sosial-politik, Membahas nasionalisme, kebebasan, dan identitas bangsa, Menawarkan analisis filosofis terhadap peristiwa sejarah.

Penelitian ini berfokus pada analisis makna dan nilai filosofis, bukan pada pengukuran empiris atau eksperimen. Eksistensialisme sebagai aliran filsafat hanya dapat dipahami secara mendalam

melalui teks, gagasan, dan refleksi teoritis, sehingga studi literatur menjadi pendekatan yang paling relevan.

Hasil dan Pembahasan

Filsafat Eksistensialisme

Pemikiran Jean-Paul Sartre

Eksistensialisme Sartre menegaskan bahwa eksistensi manusia mendahului esensinya. Manusia tidak memiliki hakikat atau kodrat yang sudah ditentukan sebelumnya; manusia pertama-tama *ada*, lalu melalui pilihan dan tindakannya membentuk dirinya sendiri. Dalam *Being and Nothingness*, Sartre menegaskan bahwa tidak ada Tuhan atau struktur metafisik yang menentukan makna hidup manusia. Oleh karena itu, manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas siapa dirinya dan apa yang ia lakukan (Sartre, J. P., Richmond, S., & Moran, R. 2018).

Sartre membedakan dua modus keberadaan utama. *Being-in-itself* (*l'être-en-soi*) merujuk pada benda-benda yang bersifat penuh, statis, dan tidak reflektif. Sebaliknya, *Being-for-itself* (*l'être-pour-soi*) adalah keberadaan manusia yang sadar, reflektif, dan selalu terbuka terhadap kemungkinan. Kesadaran manusia tidak pernah identik dengan dirinya sendiri; ia selalu “menjadi”, bukan “selesai”

Konsep ketiadaan (*nothingness*) merupakan fondasi kebebasan manusia dalam filsafat Sartre. Kesadaran manusia memiliki kemampuan untuk “meniadakan” (*nihilation*), yaitu mengambil jarak dari fakta, kondisi, dan masa lalunya. Dengan kemampuan ini, manusia dapat mengatakan “tidak” terhadap apa yang sudah ada dan membayangkan kemungkinan lain. Karena itu, kebebasan bukan tambahan pada manusia, melainkan struktur dasar kesadarannya

Dalam *Being and Nothingness*, Sartre menegaskan bahwa manusia “dikutuk untuk bebas”. Kebebasan ini bersifat radikal karena manusia selalu memilih, bahkan ketika ia tampak tidak memilih. Tidak ada alasan eksternal—baik kodrat, Tuhan, maupun struktur sosial—yang sepenuhnya dapat membebaskan manusia

dari tanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan selalu disertai kecemasan (*anguish*), karena manusia menyadari bahwa dirinya sendirilah sumber nilai dan makna hidupnya

Sartre memperkenalkan konsep *bad faith* (*mauvaise foi*) untuk menjelaskan cara manusia melarikan diri dari kebebasannya. *Bad faith* terjadi ketika seseorang menyangkal kebebasan dan tanggung jawabnya dengan berpura-pura menjadi "benda", misalnya dengan sepenuhnya mengidentifikasi diri pada peran sosial atau keadaan tertentu. Sikap ini bukan kebohongan biasa, melainkan bentuk penipuan diri yang secara eksistensial bertentangan dengan hakikat kesadaran manusia yang bebas

Eksistensialisme Sartre juga menyoroti relasi antarmanusia melalui konsep *being-for-others*. Tatapan orang lain (*the look*) membuat manusia menyadari dirinya sebagai objek, sehingga menimbulkan konflik antara kebebasan diri dan kebebasan orang lain. Relasi sosial, menurut Sartre, sering ditandai oleh ketegangan dan dominasi, karena setiap individu berusaha mempertahankan kebebasannya sendiri (Sartre, J. P., 2018).

Pemikiran Søren Aabye Kierkegaard

Søren Aabye Kierkegaard (1813–1855) adalah filsuf Denmark yang dianggap sebagai perintis eksistensialisme. Pemikirannya muncul sebagai kritik terhadap filsafat spekulatif Hegelian yang dominan pada abad ke-19. Kierkegaard menolak pandangan bahwa kebenaran dapat dipahami secara objektif dan sistematis, karena menurutnya kebenaran sejati berkaitan dengan keberadaan individual manusia (Kierkegaard, 1846/1992). Ia menegaskan bahwa filsafat harus berangkat dari pengalaman hidup konkret manusia, bukan dari abstraksi rasional semata.

Kierkegaard, eksistensi mendahului esensi, meskipun ia memahaminya dalam kerangka religius. Manusia tidak ditentukan oleh sistem atau struktur universal, melainkan oleh pilihan-pilihan

personal yang diambil dalam kehidupan nyata (Kierkegaard, 1843/1987). Eksistensi manusia bersifat subjektif, unik, dan tidak dapat direduksi menjadi hukum-hukum umum. Oleh karena itu, individu bertanggung jawab penuh atas makna hidupnya sendiri.

Kierkegaard mengemukakan tiga tahap eksistensi (*stages of life*), yang menggambarkan cara manusia menjalani hidupnya: 1) Tahap Estetis, Individu hidup untuk kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan instan. Hidup dijalani tanpa komitmen moral yang mendalam, sehingga sering berakhir pada kehampaan dan keputusasaan. 2) Tahap Etis, Individu mulai menyadari tanggung jawab moral, memilih hidup berdasarkan norma, kewajiban, dan komitmen sosial. Pada tahap ini, manusia mulai memaknai diri sebagai subjek yang bertanggung jawab 3) Tahap Religius Tahap tertinggi, di mana individu menjalin hubungan personal dengan Tuhan melalui iman. Pada tahap ini, rasio tidak lagi menjadi penentu utama, melainkan "lompatan iman" (*leap of faith*) (Kierkegaard, 1843/1985).

Kierkegaard memperkenalkan konsep kecemasan (*anxiety*) sebagai kondisi eksistensial manusia yang sadar akan kebebasan dan kemungkinan memilih (Kierkegaard, 1844/1980). Kecemasan bukan sekadar gangguan psikologis, melainkan tanda bahwa manusia adalah makhluk bebas.

Selain itu, keputusasaan (*despair*) dipahami sebagai kegagalan individu untuk menjadi dirinya sendiri secara autentik. Keputusasaan muncul ketika manusia menolak relasinya dengan Tuhan atau menolak tanggung jawab atas eksistensinya (Kierkegaard, 1849/1989). Salah satu tesis terkenal Kierkegaard adalah "kebenaran adalah subjektivitas". Ia tidak menolak kebenaran objektif secara total, tetapi menegaskan bahwa kebenaran yang bermakna bagi kehidupan manusia adalah kebenaran yang dihayati dan dijalani (Kierkegaard, 1846/1992). Dengan demikian, iman, etika, dan makna hidup tidak dapat dipaksakan melalui sistem

rasional, melainkan harus dialami secara personal.

Pemikiran Karl Jaspers

Karl Theodor Jaspers dikenal sebagai tokoh utama dalam tradisi *philosophy of existence* meskipun ia sendiri menolak identifikasi dengan aliran *eksistensialisme* yang populer di Prancis, dan lebih memilih istilah *Existenzphilosophie*. Pemikiran ini membedakan antara eksistensi sebagai pengalaman konkret dan pengetahuan obyektif yang ditawarkan ilmu pengetahuan (Jaspers, 1938 dalam *Philosophy of Existence*) yakni eksistensi manusia tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi objek pengetahuan ilmiah (Jaspers, 1971).

Penggunaan istilah *Existenzphilosophie* oleh Jaspers menunjukkan bahwa keberadaannya bukan sekadar “ada” sebagai entitas, tetapi pengalaman hidup yang unik, penuh kebebasan, dan keterbatasan yang hanya dapat dipahami melalui refleksi eksistensial, bukan hanya melalui pengamatan obyektif.

Central dalam filsafat eksistensi Jaspers adalah gagasan tentang situasi batas (*Grenzsituationen*), yaitu pengalaman-pengalaman fundamental seperti penderitaan, konflik, dan kematian yang tidak dapat dihindari. Menurut pemahaman ini, keadaan-keadaan tersebut tidak diselesaikan melalui pengetahuan biasa tetapi *dihadapi secara eksistensial* oleh individu, sehingga memicu refleksi diri yang mendalam Jaspers melihat situasi batas sebagai pengalaman yang memungkinkan manusia untuk menyadari keterbatasan dirinya sekaligus membuka kemungkinan menuju transendensi, suatu dimensi yang melampaui eksistensi obyektif biasa. Dalam transendensi inilah eksistensi otentik dapat dialami, karena individu tidak lagi hanya ‘ada’ sebagai objek dalam dunia tetapi *menghadapi dirinya sendiri* dalam kebebasan yang radikal.

Walaupun sering diposisikan dalam kelompok filsuf eksistensialis, Jaspers justru melakukan kritik terhadap bentuk

eksistensialisme seperti yang dikembangkan Sartre. Larysa Mandryshchuk (2023) menjelaskan bahwa Jaspers menolak pandangan eksistensialisme yang menurutnya berusaha mempelajari “manusia sebagai objek di antara objek-objek lain”, yang menempatkan esensi manusia pada gambaran objektif semata, berbeda dengan *elucidation of existence* (penjelasan eksistensi) yang justru bersifat reflektif dan pribadi.

Mandryshchuk (2023) menegaskan bahwa Jaspers membedakan *Existenz* eksistensi yang otentik dengan apa yang disebut sebagai “eksistensialisme” karena pemakaian konsep itu terkadang kabur dan terlalu abstrak, serta mengabaikan pengalaman subjektif dalam situasi batas.

Dalam kajian filsafat eksistensinya, Jaspers menempatkan kebebasan keputusan sebagai ciri khas manusia yang otentik. Kebebasan, bagi Jaspers, bukan sekadar memilih di antara sekian opsi, tetapi suatu pengalaman yang muncul ketika individu mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri dalam menghadapi situasi batas (Iman & Riandita, 2024).

Jaspers juga mengembangkan konsep komunikasi eksistensial (*Existenzkommunikation*) sebagai dasar relasi antar-manusia yang otentik: komunikasi yang tidak mereduksi individu menjadi objek, tetapi sebagai pertemuan antara dua kebebasan yang saling membuka diri terhadap transendensi dan makna. Hal ini menegaskan bahwa eksistensi otentik muncul dalam dialog terbuka dan tanggung jawab moral terhadap yang lain.

Bagi Jaspers, transendensi bukan sekadar entitas teologis, tetapi aspek fundamental dari eksistensi manusia yang menunjukkan bahwa pengalaman hidup manusia selalu “melampaui” struktur obyektif tradisional. Transendensi memfasilitasi kebebasan manusia untuk *melampaui pengetahuan obyektif* dan menghadapi makna hidup yang tidak bisa ditentukan oleh sistem logis semata

Dengan fokus pada transendensi, Jaspers menggarisbawahi bahwa eksistensi

manusia terletak dalam situasi yang melibatkan pertanggungjawaban moral dan refleksi terhadap pengalaman-pengalaman paling mendasar seperti penderitaan dan kematian; pengalaman-pengalaman ini menjadi titik temu antara eksistensi dan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar realitas empiris

Pemikiran Jaspers masih relevan dalam kajian kontemporer karena ia menawarkan cara memahami pengalaman manusia yang kompleks di luar pendekatan objektif ilmiah. Pendekatannya membuka ruang untuk kajian tentang makna, kebebasan, dan tanggung jawab dalam konteks kehidupan nyata yakni dalam interaksi sosial, politik, dan etika. Pemikirannya telah memberi inspirasi pada kajian psikoterapi eksistensial, filsafat pendidikan, serta kajian nilai dalam interaksi sosial.

Pemikiran Albert Camus

Albert Camus sering dikaitkan dengan tradisi filsafat eksistensial, meskipun ia sendiri menolak label *existentialist* secara formal; Camus lebih memilih memahami gagasannya melalui konsep absurditas yang menekankan konflik antara kebutuhan manusia akan makna dan “diamnya” alam semesta yang tidak menyediakan makna tersebut (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2011). Pemikiran Camus dan Ernest Becker memperkaya pemahaman tentang paradoks eksistensial manusia di tengah absurditas kehidupan, sehingga menunjukkan hubungan tematik antara Camus dan eksistensialisme meski keduanya tidak identik (Hawkins, M. A., 2024).

Konsep sentral dalam filsafat Camus adalah absurditas dari suatu kondisi di mana manusia terus mencari makna, nilai, dan tujuan dalam dunia yang *indifferent* dan tidak memberikan jawaban yang pasti. Ilhama Mammadova (2024) menegaskan bahwa Camus menempatkan kebutuhan manusia akan makna berhadapan langsung dengan alam semesta yang tak peduli, sehingga *absur* bukan sekadar

fenomena mental tetapi pengalaman eksistensial yang nyata.

Camus dalam esainya *Le Mythe de Sisyphe* secara klasik menjelaskan bahwa absurditas muncul karena manusia ingin makna dan keteraturan, sementara dunia menunjukkan “ketidakrasionalan” serta ketidaksinkronan antara harapan dan realitas yang ada (Camus, 1942)

Perspektif Camus tentang eksistensi manusia ditandai oleh tiga respons yang mungkin muncul dari konfrontasi absurd: bunuh diri, pemberontakan, atau kesadaran dan penerimaan terhadap kondisi sontak manusia. Dalam konteks filosofis, Camus mengutuk pilihan bunuh diri dan “lompatan iman” sebagai bentuk pelarian dari absurditas, dan malah mengusulkan *revolt* (pemberontakan) sebagai sikap yang otentik dalam menghadapi absurditas tersebut, yaitu menerima absurditas dunia tanpa menyerah pada ilusi makna palsu (nwuatuegwu, I. N., & Arinze, A. T., 2020).

Pemberontakan (*revolt*) dalam karya Camus yang dikembangkan secara analitis dalam novel-novelnya dan esainya menjadi bentuk afirmasi eksistensial terhadap hidup meskipun tanpa makna objektif yang diberikan oleh dunia. Camus melihat bahwa dalam pemberontakan, manusia tetap menegaskan martabat dan nilai hidupnya tanpa berbohong kepada realitas absurd.

Mengutip dari Reddit.com Meski sering disandingkan dengan eksistensialis seperti Sartre atau Kierkegaard, Camus *menolak* label eksistensialis itu sendiri karena ia tidak selalu menerima premis bahwa manusia dapat menciptakan makna secara bebas sebagai solusi atas absurditas. Ia mempertahankan bahwa absurditas itu harus *diakui* dan *dihadapi secara intelek dan etis*. Perbedaan ini menempatkan Camus *di persimpangan* antara eksistensialisme klasik dan bentuk pemikiran lain yang lebih fokus pada absurditas dan kondisi manusia kontemporer.

Camus menggambarkan ide-ide eksistensial dan absurd melalui karya sastra seperti *The Stranger* (*L'Étranger*) dan *The Plague* (*La Peste*). Novel *The Stranger*

menampilkan tokoh Meursault yang hidup terputus dari norma nilai sosial dan menghadapi dunia yang tampak tanpa alasan atau makna yang jelas, menggambarkan aku-eksistensi otentik dalam absurditas

Dalam *The Plague*, absurditas itu diperluas menjadi pengalaman kolektif di tengah penderitaan, menunjukkan bagaimana manusia merespons situasi yang tidak bermakna namun harus dihadapi bersama. Keduanya menampilkan konsekuensi nyata dari absurditas terhadap pengalaman hidup manusia

Pemikiran Friedrich Wilhelm Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900) adalah filsuf Jerman yang memberikan *pengaruh besar* terhadap perkembangan filsafat eksistensialisme modern melalui kritik mendalamnya terhadap nilai-nilai tradisional, moralitas, dan metafisika Barat. Pandangannya tentang “kematian Tuhan” (*God is dead*) menggambarkan runtuhnya landasan metafisik dan moral tradisional yang selama ini memberi makna pada eksistensi manusia; konsekuensi utamanya adalah munculnya nihilisme sebagai tantangan fundamental bagi umat manusia untuk *menciptakan makna sendiri atas hidupnya*. (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2025).

Nietzsche sering disebut sebagai salah satu “nenek moyang” eksistensialisme karena *diagnosisnya terhadap krisis makna* dalam kehidupan modern, di mana kebebasan individu yang sebelumnya dijaga oleh institusi metafisik atau agama kini menghadapi kekosongan nilai; kondisinya mirip dengan persoalan eksistensial yang dikaji Sartre atau Camus, meskipun Nietzsche tidak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai *eksistensialis*.

Nietzsche mengenalkan istilah nihilisme sebagai situasi di mana nilai-nilai tertinggi kehilangan kekuatan mereka, khususnya setelah runtuhnya landasan religius dan metafisik masyarakat modern. Dalam konteks ini, “kematian Tuhan”

bukan pernyataan literal tentang kematian entitas, tetapi kritik terhadap hilangnya legitimasi sistem nilai tradisional yang selama ini memberi struktur dan makna bagi eksistensi manusia (Britannica, 2025)

Fullam, J. P. (2025) mengungkap bahwa Nietzsche sering dianggap sebagai pendahulu filsafat eksistensial karena diagnosa dan penelaahan mendalam tentang *nihilisme* serta tantangan makna hidup setelah runtuhnya otoritas metafisik tradisional. tahap perkembangan manusia yang bebas melalui tiga fase reflektif Nietzsche membuka kemungkinan pandangan baru tentang pembebasan eksistensial yang menginspirasi pemikir eksistensial selanjutnya (misalnya Sartre dan Heidegger) dalam berpikir tentang identitas dan kebebasan manusia

Dengan hilangnya struktur nilai eksternal, individu dihadapkan pada kebebasan radikal: manusia harus sendiri menentukan arah nilai dan makna hidupnya, suatu kondisi eksistensial yang menunjukkan ketegangan antara kebebasan dan kehampaan nilai tema sentral eksistensialisme. Nietzsche mengartikulasikan bahwa menghadapi nihilisme adalah *tugas paling mendalam* filsafat modern, dan kegagalannya berarti goncangan makna eksistensial.

Salah satu konsep fundamental Nietzsche adalah “*will to power*” (kehendak untuk berkuasa), yang tidak semata-mata diartikan sebagai hasrat dominasi, tetapi sebagai dorongan *kreatif untuk mengadakan penilaian ulang terhadap semua nilai* yang sudah usang. “*Will to power*” bagi Nietzsche merupakan kondisi esensial bagi subjek eksistensial: yaitu kekuatan untuk melampaui nihilisme, menolak nilai-nilai tradisional yang tidak lagi relevan, dan *menciptakan nilai-nilai baru yang lebih menyatakan kekuatan hidup* (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2025)

Dalam *Thus Spoke Zarathustra* (1883–1885), Nietzsche memperkenalkan figur *Übermensch* (*superman*) sebagai simbol *manusia yang menegaskan dirinya* di tengah kekosongan nilai. *Übermensch* adalah protagonis filosofis yang mampu

mengatasi nihilisme, menciptakan nilai-nilai baru berdasarkan *kebebasan kreatif* dan afirmasi penuh terhadap realitas, termasuk penderitaan, konflik, dan ambiguitas hidup (Britannica, 2025).

Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dipicu oleh runtuhnya kekuasaan Jepang setelah pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki, memaksa Jepang menyerah kepada Sekutu dan menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia pada Agustus 1945. Perubahan situasi geopolitik inilah yang memberi ruang bagi para pemimpin nasional untuk segera mengambil keputusan penting tersebut (Rinardi, 2017).

Kajian sejarah menyatakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan momen penting yang menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Peristiwa ini terjadi tepat setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, ketika kekosongan kekuasaan memberi peluang bagi pemimpin nasional untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda (De Graaf, 1959). Proklamasi tersebut menjadi deklarasi formal atas kedaulatan bangsa Indonesia yang telah melalui perjuangan panjang sejak masa kolonial hingga pendudukan Jepang.

Kahin, G. M. (2000) mengungkapkan bahwa teks deklarasi itu disusun secara singkat dan strategis untuk memaksimalkan legitimasi nasional dan mengurangi konflik langsung dengan kekuatan pendudukan Jepang yang sedang runtuh. Pendekatan ini membantu memahami mengapa teks Proklamasi sederhana namun sarat makna historis; sebuah refleksi dari kondisi politik global pasca perang yang memberikan tekanan pada bangsa-bangsa jajahan untuk menuntut kemerdekaan mereka sendiri.

Peristiwa tersebut adalah hasil dari negosiasi dan ketegangan antara golongan muda yang mendesak kemerdekaan

segera dan golongan tua yang ingin legitimasi melalui struktur organisasi seperti PPKI dan badan persiapan kemerdekaan (Rinardi, 2017). Kajian ini menekankan bahwa ide kemerdekaan Indonesia bukan “hadiah” dari kekuatan kolonial atau pendudukan Jepang, tetapi hasil dari perjuangan politik yang terencana

Dalam konteks kedudukan Jepang yang melemah, proses proklamasi tidak semata “hadiah” dari Jepang, melainkan buah dari perjuangan panjang nasionalisme Indonesia yang telah berlangsung sejak awal abad ke-20 melalui badan-badan persiapan kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI.

Lebih jauh lagi, tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta dipandang sebagai representasi aspirasi rakyat Indonesia untuk menentukan nasib sendiri, yang kemudian dirumuskan dalam teks Proklamasi yang dibacakan pada pagi 17 Agustus 1945 di Jakarta. Keterlibatan Sukarni, pemuda dan tokoh lainnya menunjukkan adanya kontribusi plural kaum nasionalis dalam memastikan momentum ini tidak terlewat meskipun di bawah tekanan Jepang (Lutfi & Nurjaman, 2022).

Proklamasi tidak sekadar deklarasi simbolis, tetapi juga memiliki dimensi politik dan hukum yang kuat dalam sejarah Indonesia. Kajian hukum ketatanegaraan menunjukkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 mengandung tiga makna penting: pengakuan kedaulatan nasional, deklarasi kemerdekaan, dan usaha untuk mengangkat martabat bangsa melalui pembentukan hukum nasional yang menggantikan hukum kolonial (Satia, Rimayani, & Nuraini, 2019). Peristiwa ini membuka jalan bagi lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sehari setelah Proklamasi, menunjukkan kesinambungan antara deklarasi politik dan pembentukan struktur negara (Satia et al., 2019).

Anggraeini, dkk. (2025) mengungkapkan bahwa pemahaman Proklamasi juga penting dikaitkan dengan dinamika media dan opini nasional saat

itu, di mana pers berperan aktif dalam membentuk dukungan publik terhadap kemerdekaan dan mempertahankan konsolidasi politik selama periode Revolusi Nasional.

Proklamasi Kemerdekaan bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga pilar identitas nasional Indonesia. Kajian nasional menegaskan bahwa Proklamasi menjadi symbol kuat “ingatan kolektif” yang mempersatukan rakyat dan memainkan peran sentral dalam pembentukan identitas bangsa di era pasca-kemerdekaan. Pendekatan ini menyoroti bahwa pengakuan atas Proklamasi secara kultural membantu memperkuat rasa persatuan dan niat untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap ancaman yang masih ada setelah 1945 (Novi, F., dkk). Para pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia ialah Ir. Soekarno, Drs. H. Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo Djojo adisoerjo, Laksamana Tadashi Maeda, Sukarni, fatmawati, sayuti malik dll..

Peristiwa seperti Rengasdengklok sebagai proses internal yang memperkuat semangat nasionalisme, di mana golongan muda mendesak pemimpin agar tidak menunda pengumuman kemerdekaan dalam menghadapi situasi global yang berubah cepat bahwa pembacaan teks kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil keputusan bersama para pemimpin nasional setelah menerima tekanan dari golongan pemuda, terutama setelah peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 (De Graaf, 1959) Golongan muda ini mendorong percepatan proklamasi karena situasi Jepang yang menyerah, sementara golongan tua seperti Soekarno dan Hatta awalnya lebih berhati-hati menunggu legitimasi melalui PPKI (Rinardi, 2017).

Adapun nama-nama golongan tersebut ialah: Sukarni Kartodiwirjo (Tokoh pemuda radikal yang mendorong proklamasi segera tanpa campur tangan Jepang), Wikana (Aktif mendesak Soekarno Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan).

Chaerul Saleh (Pemuda Menteng 31 yang berperan besar dalam perencanaan “pengamanan” Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok). Singgih (Pemuda yang ikut dalam koordinasi teknis penculikan). Jusuf Kunto (Perwira PETA yang mengantar Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok dan menjamin keamanan mereka)

Peristiwa Rengasdengklok merupakan sebuah momentum penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, terjadi pada 16 Agustus 1945 ketika sejumlah pemuda membawa Soekarno dan Mohammad Hatta dari Jakarta ke Rengasdengklok, Karawang. Tindakan ini bertujuan untuk menjauhkan kedua proklamator dari pengaruh Jepang dan mendesak percepatan proklamasi kemerdekaan karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan menciptakan kekosongan kekuasaan. Pemuda melihat bahwa keterlambatan proklamasi dapat menjadikan kemerdekaan Indonesia sekadar “hadiah” dari Jepang, bukan hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri, sehingga ketegangan antara golongan muda dan tua mencapai puncaknya.

Rengasdengklok dipandang sebagai peristiwa yang sarat nilai simbolik dan mampu memperkuat kesadaran sejarah lokal sekaligus identitas sipil. memori kolektif tentang peristiwa tersebut dibentuk melalui narasi sejarah, keterikatan emosional, dan pengalaman bersama masyarakat Karawang, namun nilai-nilai tersebut belum optimal diintegrasikan ke dalam pendidikan formal maupun kebijakan budaya secara sistematis (Reksi, dkk., , 2025)

Peristiwa Rengasdengklok menjadi penghubung antara ketegangan politik dan tekad kolektif untuk memproklamasikan kemerdekaan. Penelitian nasional menyatakan bahwa penculikan tersebut tidak semata-mata tindakan kekerasan, melainkan usaha para pemuda untuk mendesak percepatan keputusan politik yang mereka anggap mendesak untuk masa depan bangsa (Utami et al., 2024)

Febrianti, B (2024), peristiwa ini dipandang sebagai pembuka dan pendorong semangat revolusi yang membangun atmosfer persatuan dan memberi momentum kuat bagi proklamasi pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini membantu menyatukan aspirasi golongan tua dan muda hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan tentang waktu dan cara proklamasi

Menurut Wiratama et al. (2023), situs bersejarah Rengasdengklok dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan guna meningkatkan semangat nasionalisme di kalangan pelajar. Menurut penelitian ini, penggunaan situs sejarah secara efektif dapat memengaruhi perubahan sikap dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai perjuangan kemerdekaan (Wiratama, Ramadhan, Bestari & Iswandi, 2023).

Narasi lokal tentang peristiwa Rengasdengklok memiliki potensi besar untuk memperkuat kesadaran warga terhadap sejarah dan identitas kebangsaan, namun keterbatasan ruang dialog antar generasi masih menjadi tantangan dalam pemanfaatannya bagi pendidikan sipil secara lebih luas.

Existentialism dalam Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, pilihan, dan keberanian individu dalam menentukan makna hidupnya sendiri di tengah situasi yang tidak pasti (Sartre, 1946; Kierkegaard, 1843). Dalam konteks sejarah, eksistensialisme dapat digunakan sebagai lensa interpretatif untuk memahami tindakan-tindakan manusia yang lahir dari kondisi krisis, keterbatasan, dan tekanan struktural. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dapat dipahami sebagai manifestasi kolektif dari tindakan eksistensial bangsa Indonesia yang memilih “menjadi” bangsa merdeka melalui keputusan sadar dan penuh risiko (Sartre, 1946).

Menjelang Proklamasi, Indonesia berada dalam situasi *liminal*: kekuasaan Jepang runtuh, tetapi kedaulatan belum diakui secara internasional. Situasi ini menciptakan apa yang dalam eksistensialisme disebut sebagai *situasi batas* (*Grenzsituation*), yakni kondisi ekstrem yang memaksa manusia mengambil keputusan fundamental tentang eksistensinya (Jaspers, 1932). Kesadaran akan kekosongan kekuasaan mendorong para tokoh nasional untuk menyadari bahwa kemerdekaan tidak akan “diberikan”, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata (Ricklefs, 2008).

Peristiwa Rengasdengklok mencerminkan konflik eksistensial antara generasi tua dan muda. Golongan muda menuntut keputusan segera sebagai bentuk penegasan kebebasan dan otentisitas, sementara golongan tua mempertimbangkan dimensi politis dan diplomatis (Anderson, 1972). Dalam perspektif eksistensialisme, tindakan golongan muda mencerminkan prinsip bahwa eksistensi mendahului esensi—bahwa makna kemerdekaan baru akan tercipta setelah tindakan diambil, bukan sebelumnya (Sartre, 1946).

Pembacaan Proklamasi oleh Soekarno dan Mohammad Hatta merupakan tindakan eksistensial yang sarat tanggung jawab. Mereka menyadari sepenuhnya risiko militer, politik, dan sosial yang mungkin timbul, namun tetap memilih untuk bertindak. Dalam kerangka eksistensialisme, kebebasan tidak pernah terlepas dari tanggung jawab moral atas konsekuensi pilihan (Sartre, 1946). Proklamasi bukan sekadar pernyataan hukum, melainkan keputusan etis dan eksistensial yang menentukan arah keberadaan bangsa Indonesia (Latif, 2011).

Eksistensialisme memandang eksistensi sebagai proses “menjadi” (*becoming*), bukan keadaan statis. Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak langsung menciptakan negara yang mapan, melainkan membuka ruang perjuangan lanjutan melalui revolusi fisik dan diplomasi (Kahin, 1952). Dengan

demikian, kemerdekaan Indonesia merupakan proyek eksistensial kolektif yang terus diperjuangkan dan dimaknai ulang oleh generasi berikutnya.

Memahami Proklamasi melalui perspektif eksistensialisme memberikan implikasi penting bagi pendidikan sejarah dan kewarganegaraan. Proklamasi tidak hanya diajarkan sebagai fakta kronologis, tetapi sebagai contoh keberanian memilih, tanggung jawab moral, dan kesadaran eksistensial warga negara. Nilai-nilai ini relevan dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Tilaar, 2009).

Kajian eksistensialisme dalam Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa peristiwa 17 Agustus 1945 merupakan tindakan eksistensial kolektif bangsa Indonesia. Di tengah ketidakpastian sejarah, para pendiri bangsa memilih untuk bertindak secara bebas dan bertanggung jawab, menjadikan kemerdekaan sebagai hasil keputusan sadar, bukan pemberian. Dengan demikian, Proklamasi dapat dipahami sebagai momen ketika bangsa Indonesia secara eksistensial menyatakan “ada” dan menentukan makna keberadaannya sendiri dalam sejarah dunia.

Pemikiran Jean-Paul Sarte yang terkait

Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, pilihan, dan keberanian individu dalam menentukan makna hidupnya sendiri di tengah situasi yang tidak pasti. Dalam konteks sejarah, eksistensialisme dapat digunakan sebagai lensa interpretatif untuk memahami tindakan-tindakan manusia yang lahir dari kondisi krisis, keterbatasan, dan tekanan struktural. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dapat dipahami sebagai manifestasi kolektif dari tindakan eksistensial bangsa Indonesia yang memilih “menjadi” bangsa merdeka melalui keputusan sadar dan penuh risiko.

Penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang dapat dipahami

sebagai *facticity*, yakni kondisi objektif yang tidak dipilih bangsa Indonesia tetapi harus dihadapi. Menurut Sartre, manusia tidak pernah sepenuhnya bebas dari situasi, namun selalu bebas dalam menyikapi situasi tersebut (Sartre, 1956). Dalam konteks ini, bangsa Indonesia berada dalam keterbatasan struktural, tetapi tetap memiliki kebebasan eksistensial untuk menentukan sikap: menerima keterjajahan atau mengambil risiko untuk merdeka

Penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang dapat dipahami sebagai *facticity*, yakni kondisi objektif yang tidak dipilih bangsa Indonesia tetapi harus dihadapi. Menurut Sartre, manusia tidak pernah sepenuhnya bebas dari situasi, namun selalu bebas dalam menyikapi situasi tersebut (Sartre, 1956). Dalam konteks ini, bangsa Indonesia berada dalam keterbatasan struktural, tetapi tetap memiliki kebebasan eksistensial untuk menentukan sikap: menerima keterjajahan atau mengambil risiko untuk merdeka (Ricklefs, 2008).

Sartre memperkenalkan konsep *bad faith* (ketidakotentikan), yaitu sikap menyangkal kebebasan diri dengan berlindung pada alasan eksternal seperti takdir, struktur kekuasaan, atau perintah otoritas. Dalam konteks Proklamasi, sikap menunggu keputusan Jepang atau Sekutu dapat dipandang sebagai potensi *bad faith*. Sebaliknya, keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri merupakan tindakan otentik yang menolak penyangkalan kebebasan nasional.

Peristiwa Rengasdengklok mencerminkan ketegangan antara kesadaran eksistensial yang menuntut tindakan segera dan kehati-hatian politis. Dalam kerangka Sartre, desakan golongan muda mencerminkan tuntutan otentisitas: kebebasan harus diwujudkan dalam tindakan, bukan sekadar wacana. Sementara itu, golongan tua berada dalam dilema antara tanggung jawab historis dan risiko konkret. Konflik ini menunjukkan bahwa kebebasan selalu diiringi

kecemasan (*anguish*) karena tidak adanya jaminan keberhasilan.

Pembacaan Proklamasi oleh Soekarno dan Mohammad Hatta merupakan contoh tindakan eksistensial Sartrean yang utuh. Mereka bertindak tanpa legitimasi formal internasional, tetapi dengan kesadaran penuh atas konsekuensi yang mungkin terjadi. Menurut Sartre, setiap pilihan individu adalah pernyataan tentang nilai yang diyakini layak bagi seluruh umat manusia (Sartre, 1946). Dengan demikian, Proklamasi bukan hanya tindakan politik nasional, tetapi juga pernyataan moral universal tentang hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dalam pemikiran Sartre, manusia tidak hanya *being-for-itself* (*pour-soi*), tetapi juga *being-for-others*, yakni keberadaannya selalu berada dalam relasi sosial dan penilaian pihak lain. Proklamasi Kemerdekaan merupakan upaya bangsa Indonesia menegaskan eksistensinya di hadapan bangsa-bangsa lain. Pengakuan internasional yang menyusul menunjukkan bahwa tindakan eksistensial nasional harus diuji dan dimaknai dalam relasi global.

Sartre menegaskan bahwa eksistensi adalah proyek yang tidak pernah selesai (*project of being*). Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari rangkaian pilihan eksistensial berikutnya: mempertahankan kemerdekaan, membangun negara, dan menegakkan keadilan sosial (Sartre, 1956). Dalam konteks ini, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari pilihan sadar yang harus terus diperbarui melalui tindakan kolektif warga negara.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, pendekatan Sartrean terhadap Proklamasi menegaskan bahwa warga negara bukan subjek pasif, melainkan agen bebas yang bertanggung jawab atas masa depan bangsanya. Nilai kebebasan, tanggung jawab, dan keberanian mengambil keputusan historis menjadi landasan pembentukan warga negara yang kritis dan partisipatif.

Pemikiran Søren Aabye Kierkegaard yang terkait

Søren Aabye Kierkegaard dipandang sebagai pelopor eksistensialisme yang menekankan subjektivitas, pilihan personal, kecemasan (*anxiety*), dan lompatan iman (*leap of faith*) dalam keberadaan manusia. Berbeda dengan eksistensialisme ateistik Sartre, Kierkegaard memandang eksistensi manusia sebagai relasi antara individu dan Tuhan. Namun demikian, inti pemikirannya adalah keputusan subjektif di tengah ketidakpastian yang relevan untuk menafsirkan tindakan historis kolektif, termasuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dalam pemikiran Kierkegaard, keputusan (*despair*) muncul ketika individu tidak berani menjadi dirinya sendiri atau menyerahkan dirinya pada determinasi eksternal. Penjajahan dapat dipahami sebagai bentuk keputusan kolektif bangsa Indonesia, ketika eksistensi nasional direduksi menjadi objek kekuasaan kolonial. Namun, kesadaran akan keputusan ini justru menjadi tahap awal menuju kebangkitan eksistensial, karena manusia baru dapat memilih secara autentik ketika ia menyadari keterbatasannya.

Kierkegaard memandang kecemasan (*anxiety*) bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kondisi eksistensial yang menandai hadirnya kebebasan (Kierkegaard, 1844). Menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa berada dalam kecemasan mendalam akibat ketidakpastian politik, ancaman militer, dan ketiadaan legitimasi internasional. Namun, kecemasan ini justru menunjukkan adanya kemungkinan memilih antara tetap berada dalam status terjajah atau melompat menuju kemerdekaan melalui keputusan berani.

Konsep *Either/Or* (entah-atau) Kierkegaard menegaskan bahwa eksistensi manusia ditentukan oleh pilihan konkret yang tidak dapat dihindari (Kierkegaard, 1843). Peristiwa Rengasdengklok mencerminkan dilema eksistensial tersebut: apakah kemerdekaan ditunda

demokratisasi politik atau dinyatakan segera sebagai tindakan eksistensial. Desakan golongan muda dapat dipahami sebagai dorongan untuk memilih secara tegas, karena penundaan justru berpotensi memperpanjang keputusan eksistensial bangsa (Kahin, 2018).

Meskipun konsep *leap of faith* Kierkegaard bersifat religius, dalam konteks historis Proklamasi dapat dimaknai sebagai *lompatan komitmen*, keputusan radikal tanpa jaminan rasional sepenuhnya. Proklamasi Kemerdekaan dilakukan tanpa kepastian pengakuan internasional dan tanpa kesiapan negara yang mapan. Namun, dalam kerangka Kierkegaardian, justru ketidakpastian inilah yang memberi nilai eksistensial pada keputusan tersebut (Latif, Y. 2011).

Kierkegaard membagi eksistensi manusia ke dalam tahap estetis, etis, dan religius (Kierkegaard, 1843). Dalam konteks Proklamasi, bangsa Indonesia bergerak dari tahap estetis (penderitaan pasif dan adaptasi), menuju tahap etis ketika para pemimpin bangsa mengambil tanggung jawab moral untuk memproklamasikan kemerdekaan. Latif, Y. (2011). Mengungkapkan Dimensi religius tercermin dalam keyakinan spiritual dan doa yang menyertai Proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebut "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa".

Pendekatan Kierkegaardian terhadap Proklamasi memberikan landasan filosofis bagi Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pembentukan kesadaran moral, keberanian memilih, dan tanggung jawab personal warga negara. Proklamasi menjadi teladan bahwa sejarah dibentuk oleh individu dan komunitas yang berani mengambil keputusan etis dalam situasi ketidakpastian

Pemikiran Karl Jaspers yang terkait

Karl Jaspers merupakan tokoh penting eksistensialisme yang menekankan konsep *Existenz*, *situasi batas* (*Grenzsituationen*), kebebasan, dan

komunikasi eksistensial. Berbeda dari Sartre yang radikal-ateistik dan Kierkegaard yang religius-subjektif, Jaspers memandang eksistensi manusia sebagai proses pencarian makna yang terjadi melalui kesadaran akan keterbatasan dan keterlemparan manusia dalam dunia sejarah (Jaspers, 1932). Manusia menjadi eksisten secara autentik ketika ia menghadapi situasi batas dan mengambil keputusan sadar sebagai subjek bebas.

Konsep kunci Karl Jaspers adalah *situasi batas*, yaitu kondisi ekstrem seperti penderitaan, konflik, kematian, dan ketidakpastian, yang tidak dapat dihindari dan memaksa manusia merefleksikan eksistensinya secara mendalam (Jaspers, 1932). Menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berada dalam situasi batas: kekuasaan Jepang runtuh, ancaman kembalinya kolonialisme Belanda, dan ketiadaan kepastian politik. Dalam situasi ini, tidak ada jaminan rasional atau hukum internasional yang kokoh, sehingga keputusan memproklamasikan kemerdekaan merupakan respons eksistensial terhadap situasi batas sejarah

Konsep kunci Karl Jaspers adalah *situasi batas*, yaitu kondisi ekstrem seperti penderitaan, konflik, kematian, dan ketidakpastian, yang tidak dapat dihindari dan memaksa manusia merefleksikan eksistensinya secara mendalam. Menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berada dalam situasi batas: kekuasaan Jepang runtuh, ancaman kembalinya kolonialisme Belanda, dan ketiadaan kepastian politik. Dalam situasi ini, tidak ada jaminan rasional atau hukum internasional yang kokoh, sehingga keputusan memproklamasikan kemerdekaan merupakan respons eksistensial terhadap situasi batas sejarah

Konsep penting lain dalam pemikiran Jaspers adalah *komunikasi eksistensial*, yakni relasi antar manusia yang dilandasi keterbukaan, kejujuran, dan pengakuan akan kebebasan masing-masing (Jaspers, 1932). Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat dipahami sebagai

bentuk komunikasi eksistensial bangsa Indonesia kepada dunia internasional: pernyataan jujur tentang kehendak untuk merdeka dan bertanggung jawab atas keberadaannya sendiri. Proklamasi tidak hanya berbicara kepada penjajah, tetapi juga kepada rakyat Indonesia sendiri sebagai ajakan untuk berbagi tanggung jawab historis.

Pemikiran albert Camus yang terkait

Albert Camus tidak secara eksplisit menyebut dirinya eksistensialis, namun pemikirannya tentang *absurd*, pemberontakan (*revolt*), dan martabat manusia sering ditempatkan dalam tradisi eksistensialisme humanistik. Camus memandang absurditas sebagai kondisi ketika manusia merindukan makna dan keadilan, sementara dunia bersifat acuh tak acuh dan tidak memberikan kepastian rasional (Camus, 1955).

Penjajahan kolonial yang dialami bangsa Indonesia dapat dipahami sebagai kondisi absurd: penderitaan, penindasan, dan ketidakadilan yang berlangsung lama tanpa rasionalitas moral yang dapat diterima. Dalam kerangka Camus, absurditas ini muncul dari pertentangan antara tuntutan kemanusiaan bangsa Indonesia untuk merdeka dan realitas dunia kolonial yang menafikan martabat tersebut. Kesadaran akan absurditas inilah yang menjadi titik awal bagi tindakan historis menuju kemerdekaan.

Menurut Camus, kesadaran absurd tidak berakhir pada keputusan, melainkan melahirkan pemberontakan sebagai afirmasi kehidupan dan kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, kesadaran kolektif bahwa penjajahan tidak dapat dibenarkan secara moral mendorong lahirnya gerakan nasional dan keputusan radikal untuk memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat dipahami sebagai bentuk pemberontakan eksistensial terhadap tatanan kolonial yang absurd dan menindas (Kahin, 2018).

Peristiwa Rengasdengklok mencerminkan ketegangan antara keberanian eksistensial dan kalkulasi

rasional yang berpotensi memperpanjang absurditas. Dalam perspektif Camus, menunda tindakan demi menunggu legitimasi kekuasaan asing dapat dipandang sebagai bentuk kompromi dengan ketidakadilan. Desakan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan mencerminkan sikap pemberontakan Camusian: menolak tunduk pada logika kekuasaan yang tidak bermoral dan memilih bertindak demi martabat manusia. Bagi Camus, pemberontakan sejati bukanlah kekerasan destruktif tanpa arah, melainkan tindakan etis yang berakar pada solidaritas dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk pemberontakan bermartabat karena menegaskan hak bangsa Indonesia untuk hidup bebas tanpa meniadakan kemanusiaan pihak lain. Proklamasi bukan sekadar strategi politik, tetapi pernyataan moral bahwa penindasan tidak dapat diterima dalam kondisi apapun.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, pendekatan Camusian terhadap Proklamasi menekankan nilai keberanian moral, solidaritas, dan penolakan terhadap ketidakadilan. Warga negara dipandang sebagai subjek yang bertanggung jawab untuk terus "memberontak" secara etis terhadap segala bentuk penindasan, korupsi, dan ketidakadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemikiran Friedrich Nietzsche yang terkait

Friedrich Nietzsche sering disebut sebagai salah satu fondasi utama eksistensialisme modern, meskipun ia tidak menggunakan istilah tersebut secara eksplisit. Pemikirannya menekankan kehendak untuk berkuasa (*will to power*), kritik terhadap moralitas budak (*slave morality*), penolakan terhadap nihilisme pasif, serta konsep *Übermensch* sebagai simbol manusia yang mampu menciptakan nilai-nilai baru secara otonom (Nietzsche, 1887; 1883). Bagi Nietzsche, eksistensi manusia menemukan

maknanya ketika manusia berani menegaskan diri, melampaui ketakutan, dan menciptakan makna hidupnya sendiri melalui tindakan afirmatif.

Konsep *will to power* dalam pemikiran Nietzsche bukan semata-mata hasrat dominasi, melainkan dorongan fundamental untuk menegaskan keberadaan, kreativitas, dan kehidupan itu sendiri (Nietzsche, 1883). Kebangkitan nasional Indonesia dan puncaknya pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat dipahami sebagai ekspresi kolektif *will to power* bangsa Indonesia yang berkehendak untuk menegaskan eksistensi, menentukan nasib sendiri, dan keluar dari status sebagai objek sejarah kolonial.

Nietzsche membedakan antara tindakan aktif dan reaktif. Tindakan reaktif lahir dari ketakutan dan penyesuaian, sedangkan tindakan aktif lahir dari afirmasi diri (Nietzsche, 1887). Peristiwa Rengasdengklok mencerminkan ketegangan antara sikap reaktif yang menunggu legitimasi Jepang atau Sekutu, dorongan aktif untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Desakan golongan muda dapat ditafsirkan sebagai upaya melampaui sikap reaktif dan menegaskan tindakan afirmatif terhadap kehidupan dan sejarah.

Tindakan yang bernilai tinggi adalah tindakan yang mengafirmasi kehidupan, meskipun penuh risiko dan penderitaan (*amor fati*—mencintai nasib). Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan tindakan afirmatif semacam itu: keputusan berani yang menerima kemungkinan konflik, perang, dan pengorbanan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan menjadi bangsa merdeka. Dalam kerangka ini, Proklamasi bukan hasil kalkulasi aman, melainkan keberanian untuk mengatakan “ya” pada kehidupan dan sejarah.

Nietzsche menolak pandangan esensialis tentang manusia; eksistensi selalu merupakan proses “menjadi” (*becoming*). Proklamasi tidak menjadikan Indonesia secara instan sebagai negara yang sempurna, melainkan membuka proses panjang pembentukan diri bangsa.

Dalam perspektif Nietzschean, bangsa Indonesia setelah Proklamasi berada dalam proses terus-menerus untuk melampaui dirinya sendiri (*self-overcoming*) dalam bidang politik, sosial, dan budaya.

Pendekatan Nietzschean terhadap Proklamasi memberikan kontribusi penting bagi Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pendidikan Sosial yang kritis. Warga negara tidak dipandang sebagai subjek patuh semata, melainkan individu yang mampu berpikir kritis, menolak mentalitas tunduk, dan berani menciptakan nilai-nilai kebangsaan yang relevan dengan tantangan zaman. Proklamasi menjadi teladan historis tentang keberanian melampaui ketakutan dan ketergantungan struktural.

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 bukan sekadar peristiwa politik-historis, melainkan tindakan eksistensial kolektif bangsa Indonesia. Dalam situasi batas yang penuh ketidakpastian, para pendiri bangsa secara sadar dan bertanggung jawab memilih kemerdekaan sebagai penegasan eksistensi nasional. Melalui perspektif eksistensialisme (Sartre, Kierkegaard, Jaspers, Camus, dan Nietzsche), Proklamasi dipahami sebagai wujud kebebasan, keberanian moral, dan tanggung jawab historis untuk menentukan makna keberadaan bangsa sendiri. Pendekatan ini memperkaya pemahaman sejarah dan memberikan kontribusi konseptual penting bagi Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS, dengan menekankan pembentukan warga negara yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam meneruskan proyek eksistensial kemerdekaan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. *Java in a Time of Revolution*. Cornell University Press, 1972.
Camus, A. *Le mythe de Sisyphe*. Gallimard, 1942.

- Camus, A. *L'homme révolté*. Gallimard, 1951.
- Camus, A. *L'Étranger & La peste*. Gallimard, 1942/1947.
- Camus, A., & Becker, E. *Albert Camus, Ernest Becker, and the Art of Living in Existential Paradox*. Journal of Humanistic Psychology, 2019.
- Cogan, J. J., & Derricott, R. *Citizenship for the 21st Century*. Kogan Page, 1998.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications, 2018.
- Delanty, G. *Nationalism and Social Theory: Modernity and the Recalcitrance of the Nation*. SAGE Publications, 2002.
- Delanty, G., & Kumar, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Nations and Nationalism*. SAGE Publications, 2006.
- De Graaf, H. J. *The Indonesian Declaration of Independence: 17th of August 1945*. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 115(4), 305–327, 1959.
- Febrianti, B. *Peristiwa Rengasdengklok Menjadi Pembuka Kemerdekaan Indonesia*. JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah, 4(2), 20–31, 2024.
- Fullam, J. P. *From Liberation to Self-Creation: Toward a Nietzschean Theory of Transformative Learning*. Journal of Transformative Education, 23(4), 486–502, 2025.
- Hawkins, M. A. *Albert Camus, Ernest Becker, and the Art of Living in Existential Paradox*. Journal of Humanistic Psychology, 64(2), 281–300, 2024.
- Iman, M. T., & Riandita, L. *Konsep Ketuhanan dalam Kebebasan Eksistensial Karl Jaspers*. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8(1), 2024.
- Jaspers, K. *Philosophy*. University of Chicago Press, 1932.
- Jaspers, K. *Philosophy of Existence* (R. F. Grabau, Trans.). University of Pennsylvania Press, 1971.
- Kahin, G. M. *Sukarno's Proclamation of Indonesian Independence*. Cornell University, 2000.
- Kahin, G. M. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press, 2018.
- Kartodirdjo, S. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia, 1993.
- Kierkegaard, S. *The Concept of Anxiety* (R. Thomte, Trans.). Princeton University Press, 1980.
- Kierkegaard, S. *Fear and Trembling* (A. Hannay, Trans.). Penguin Books, 1985.
- Kierkegaard, S. *Either/Or* (H. V. Hong & E. H. Hong, Trans.). Princeton University Press, 1987.
- Kierkegaard, S. *The Sickness Unto Death* (H. V. Hong & E. H. Hong, Trans.). Princeton University Press, 1989.
- Kierkegaard, S. *Concluding Unscientific Postscript* (H. V. Hong & E. H. Hong, Trans.). Princeton University Press, 1992.
- Latif, Y. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lutfi, F. M., & Nurjaman, A. *Keterlibatan Sukarni dalam Peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 1945*. Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, 1(3), 139–149, 2022.
- Mandryshchuk, L. *Karl Jaspers' Critique of Existentialism*. Filosofska Dumka, 4, 125–137, 2023.
- Mammadova, I. *The Concept of the Absurd: Camus' Literary Exploration of Existential Philosophy*. Global Spectrum of Research and Humanities, 1(1), 111–120, 2024.
- Nietzsche, F. W. *Thus Spoke Zarathustra*. Penguin Books, 1883.
- Nietzsche, F. W. *On the Genealogy of Morals*. Vintage Books, 1887.
- Onwuatuogwu, I. N., & Arinze, A. T. *The Problem of Absurdity and Its Solution in Albert Camus' Existential Philosophy*. London Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 20(15), 43–45, 2020.
- Purnama, A. Y., Putri, A. S., & Saputri, R. *The Philosophy of Existentialism: Individual Awareness in Indonesian Education*. RADIANT: Journal of Applied, Social, and Education Studies, 2(3), 220–227, 2021.
- Reksi, Triyanto, & Gunawati, D. *Collective Memory and Local Civic Identity: Reinterpreting the Rengasdengklok Event*. Proceedings of the International

- Conference on Social Sciences and Education, 147-154, 2025.
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Stanford University Press, 2008.
- Sartre, J.-P. *Critique of Dialectical Reason*. Verso, 1956.
- Sartre, J.-P. *Existentialism Is a Humanism*. Yale University Press, 2002.
- Sartre, J.-P. *Being and Nothingness: An Essay in Phenomenological Ontology* (S. Richmond, Trans.). Routledge, 2018.
- Susanto, H. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Ombak, 2014.
- Susanto, H. *Pendidikan Sejarah dan Pembentukan Karakter Bangsa*. Historia, 7(1), 1-15, 2019.
- Tillich, P. *The Courage to Be*. Yale University Press, 1952.
- Wahab, A. A., & Sapriya. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta, 2011.
- Winataputra, U. S. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Demokrasi*. SPS UPI, 2012.
- Winataputra, U. S. *Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Nilai dan Karakter*. Jurnal Civics, 12(1), 1-12, 2015.